

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan berubah sangat cepat, bukan hanya teori keuangan, namun juga pengaplikasian dalam dunia nyata, termasuk pengetahuan tentang keuangan pribadi. Dalam kegiatan sehari-hari, paham tentang keuangan pribadi menjadi penting karena pembuatan keputusan yang baik dalam keuangan dapat menghindarkan suatu individu dari masalah *negative cash flow*.

Oleh sebab itulah, keterampilan dalam pengelolaan keuangan baik itu pengetahuan dan pemahaman ini mutlak diperlukan setiap individu agar dapat mengoptimalkan penggunaan instrumen – instrumen maupun produk – produk keuangan serta mampu mengambil keputusan keuangan yang baik dan benar, dengan kata lain setiap individu harus mempunyai *financial literacy* yang memadai. Perencanaan dan pengendalian keuangan pribadi merupakan bentuk dari aplikasi manajemen keuangan. Manajemen keuangan tidak hanya penting untuk perusahaan tetapi pengetahuan akan manajemen keuangan juga penting untuk diterapkan masing-masing individu.

Menurut Lusardi dan Mitchell (2007), literasi keuangan adalah sebuah pengetahuan mengenai keuangan yang dirancang untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan bisa berdampak pada kurangnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan itu sendiri dan hal tersebut menyebabkan melambatnya

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi baik daerah maupun nasional. Sedangkan, menurut Otoritas Jasa Keuangan (2013:11) dalam Rancangan Peraturan OJK dikatakan bahwa literasi keuangan adalah tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat akan lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Dalam literasi keuangan biasanya berhubungan dengan cara masyarakat dapat mengelola dan melakukan perencanaan finansialnya sebaik mungkin.

Kecerdasan finansial merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangan pribadi ataupun asset pribadi dengan kadar prioritas yang baik (widayati, 2012). Apabila masyarakat mempunyai pemahaman yang baik tentang sistem keuangan maka akan membuat perekonomian nasional tidak berpengaruh terhadap krisis keuangan global (nidar, 2012). Menurut INFE (OECD, 2012:7) Tingkat literasi keuangan yang rendah pada masyarakat adalah salah satu faktor penyebab krisis keuangan nasional terjadi. Maka dari itu, pemahaman literasi keuangan baik itu literasi keuangan syariah menjadi hal yang penting bagi setiap individu maupun perusahaan.

Data Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2016 (www.sikapiuangmu.ojk.ac.id) menyatakan bahwa tingkat literasi negara Indonesia masih tergolong pada tingkat rendah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2016 yang pengambilan data diambil tahun 2013 bahwa masyarakat negara Indonesia tergolong pada *well literate* atau literasi tingkat baik yaitu sebesar 21,84 persen, dan mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7,82 persen

menjadi 29,66 persen pada tahun 2016. Dalam jangka waktu 3 tahun kenaikan pada Literasi keuangan hanya sebesar 7,82 persen.

Sedangkan, untuk tingkat literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,11 persen. Meskipun indeks tersebut mengalami peningkatan pada angka tetapi masih mencerminkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah atau kurang dari separuh jumlah penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan dengan baik pada produk dan jasa keuangan syariah. Rendahnya pemahaman literasi keuangan syariah tentu akan memperlambat perkembangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Maka, literasi keuangan syariah perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah

Berdasarkan persentase di atas telah menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia relatif rendah, dan akses produk dan jasa pada lembaga keuangan pun juga rendah. Pemerintah pun telah berupaya untuk terus meningkatkan literasi keuangan salah satu caranya yaitu dengan program edukasi keuangan kepada masyarakat luas sejak usia dini. Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun program Strategi Nasional Literasi Keuangan untuk meningkatkan kapasitas literasi keuangan di Indonesia namun, upaya ini masih kurang berpengaruh dan masih sangat memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah itu sendiri. Agar, masyarakat Indonesia yang kurang ataupun belum mengakses produk dan jasa lembaga keuangan dapat mengakses dengan mudah.

Literasi keuangan syariah menjadi hal yang sangat penting bagi seorang individu khususnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menurut Mahadzhir Ahmad (2010) mengatakan bahwa ada beberapa alasan pentingnya literasi keuangan syariah. *Pertama*, setiap individu harus mampu mengelola pemasukan yang mereka terima, jangan sampai pemasukan yang sudah didapatkan malah hilang ataupun habis oleh kegiatan ataupun hal – hal yang kurang penting dan cenderung tidak penting. Seseorang yang memiliki pengetahuan literasi keuangan yang buruk akan menjadi sasaran penipuan oleh pihak perusahaan investasi yang kurang kredibel. *Kedua*, setiap waktu lembaga keuangan akan mengeluarkan jenis produk yang mampu menjawab permasalahan keuangan individu saat ini. Sehingga, individu harus mampu mengetahui dan memilih produk – produk tersebut sesuai dengan kebermanfaat jangka panjang maupun pendek. *Ketiga*, semua individu lebih bisa mengetahui kepentingan dalam menghabiskan uang sehingga, yang mampu dan paham untuk mengontrol keuangan dan manajemen keuangan kembali lagi ke semua individu itu sendiri. *Keempat*, tantangan menjadi seorang Muslim adalah harus peduli terhadap larangan – larang yang sudah ditetapkan dalam AL Quran maupun Hadist seperti larangan riba, maysir, gharar. Hal tersebut dikarenakan termasuk dalam ketaatan dalam beragama. Literasi keuangan syariah menjadi modal untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih baik bagi suatu Negara.

Untuk tercapainya literasi keuangan Syariah maupun Non-Syariah yang baik, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan program yang bernama “Strategi

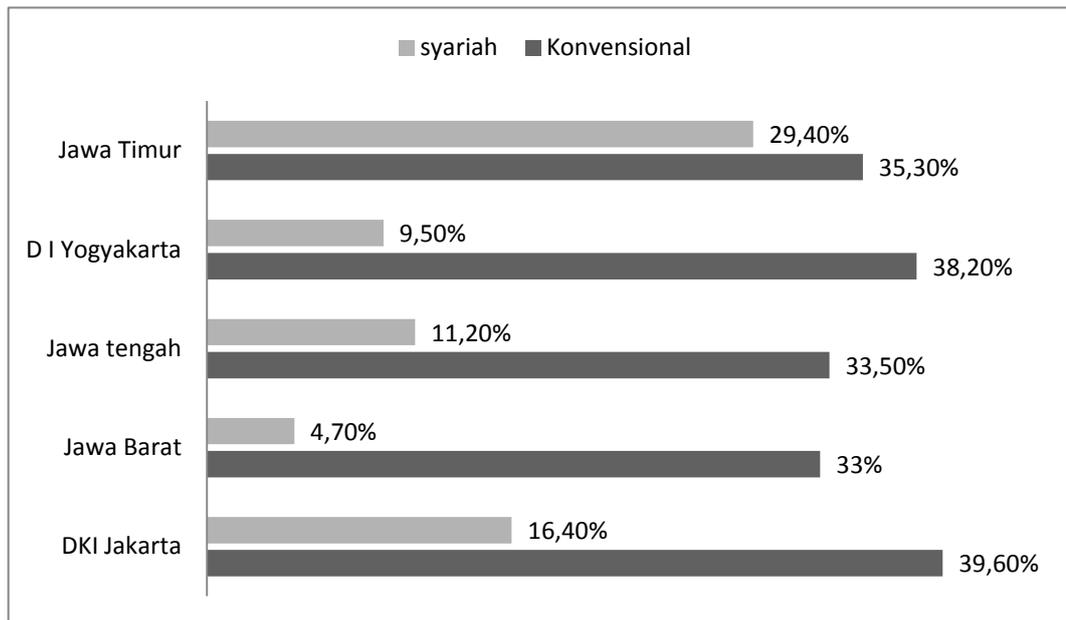
Nasional Literasi Keuangan (SNLK). Strategi Nasional Literasi Keuangan memiliki tujuan untuk memperluas akses masyarakat pada industri keuangan yaitu salah satunya melalui *financial education* (Menurut Yuliawan, Indra – *Head of Corporate Social Responsibility Allianz Indonesia* dalam Majalah OJK edisi April 2014: 09).

Pada siaran pers otoritas jasa keuangan tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan merevisit strategi nasional literasi keuangan Indonesia guna mempercepat tercapainya kenaikan indeks literasi dan inklusi keuangan. dimana, Revisit Startegi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) merupakan penyesuaian dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Inklusi yang sudah diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam revisit SNLKI terdapat penambahan unsur yaitu visi, sasaran, tema prioritas, dan program strategis. Pada sisi sasaran terdapat penambahan semakin luas yaitu pemuda, disabilitas, masyarakat tertinggal, terpencil, dan terluar, TKI dan calon TKI, petani dan nelayan, serta perubahan ibu rumah tangga menjadi perempuan.

Pemahaman terhadap literasi keuangan sangat diperlukan oleh masyarakat marginal atau biasa dalam kategori masyarakat kalangan bawah. Masyarakat marginal diambil dari bahasa inggris yaitu "*marginal*" yang memiliki arti jumlah atau efek yang sangat kecil. Maka dari itu, marginal adalah masyarakat yang masuk dalam kategori pra-sejahtera atau kaum kelas bawah terpinggirkan dimana kelompok ini memiliki jumlah yang sangat kecil dibandingkan yang lain.

Masyarakat marginal adalah masyarakat yang tersisihan dari pembangunan yang mengakibatkan masyarakat pada jenis ini kurang mendapatkan perhatian ataupun dapat menikmati program-program yang dirancang oleh pemerintah untuk mempermudah pembangunan daerah. Yang termasuk dalam kategori masyarakat marginal atau masyarakat yang terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, kelompok asongan, buruh migran maupun pemulung. Kelompok-kelompok tersebut khususnya kelompok penyandang disabilitas biasanya merupakan masyarakat yang belum mampu secara mandiri untuk mengakses pada lembaga keuangan baik itu formal maupun non-formal dan kurang memiliki kecakapan dalam mengetahui ataupun memahami produk dan jasa dalam lembaga keuangan atau bisa disebut dengan *unbankable people*.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.



Gambar 1.1
Tingkat Literasi Keuangan di Wilayah Jawa 2016

Menurut survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 mengenai literasi keuangan dan inklusi keuangan pada pulau Jawa menyatakan bahwa Jawa Timur berada pada indeks sebesar 35,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 38,2 persen, Jawa Tengah sebesar 33,5 persen, Jawa Barat sebesar 33 persen dan DKI Jakarta sebesar 39,6 persen. Sedangkan, untuk indeks literasi keuangan syariah Jawa Timur berada pada indeks sebesar 29,4 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 9,5 persen, Jawa Tengah sebesar 11,2 persen, Jawa Barat sebesar 4,7 persen dan DKI Jakarta sebesar 16,4 persen. Pada diagram diatas menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan baik itu konvensional maupun syariah di provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta masih berada pada rata-rata dibawah.

Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi

78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km. Pada sensus kependudukan yang dilakukan oleh badan statistik nasional tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah disabilitas sedang sampai berat di Indonesia berada pada 11 persen dari jumlah penduduk itu sendiri dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada peringkat ke 4 di Indonesia yaitu sebesar 278.569 jiwa untuk penyandang disabilitas (Dinkes, 2015).

Dari data tersebut, menjadikan peningkatan literasi keuangan pada penyandang disabilitas menjadi prioritas Otoritas Jasa keuangan sesuai dengan revisi SNKLI 2017. Menurut S. Soetiono, penyandang disabilitas memiliki kondisi yang paralel, dimana penyandang disabilitas berada pada kehidupan ditengah stereotipe yang buruk dan aksesibilitas publik yang rendah baik itu pendidikan dan ekonomi maka perlu ditingkatkan secara masif dan komprehensif dalam edukasi literasi keuangannya agar meningkatkan kehidupan penyandang disabilitas lebih baik (OJK, 2015). Edukasi literasi keuangan pada penyandang disabilitas menjadi program OJK yang strategis dalam peningkatan penggunaan produk pada lembaga keuangan. Untuk meningkatkan target pencapaian indeks literasi sebesar 75 persen maka perlu penguatan pada kapasitas khususnya penyandang disabilitas. Salah satu bentuk penguatan penyandang disabilitas adalah dengan meningkatkan dalam pengelolaan keuangan dan memperluas

aksestabilitas. Hal tersebut, dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah lebih merata partisipatif, dan inklusif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangan syariah yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas demi terciptanya pemahaman literasi keuangan syariah. Penelitian ini diberikan judul **“ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA PENYANDANG DISABILITAS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dituliskan, beberapa rumusan masalah mengenai tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin?
3. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan usia?
4. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pendidikan?
5. Adakah perbedaan tingkat literasi keuangan syariah penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pengeluaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan usia.
4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pendidikan.
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pengeluaran

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengaruh bagi :

1. Penyandang Disabilitas, sebagai solusi meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keuangan atau melek keuangan terutama keuangan syariah.

2. Pemerintah dan lembaga keuangan mikro terkait, sebagai referensi agar dapat lebih aktif dalam mengedukasi keuangan syariah penyandang disabilitas.
3. Para akademik sebagai referensi dalam mengkaji perkembangan literasi keuangan syariah pada penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penelitian

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai pentingnya literasi keuangan syariah untuk penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang mengukur dan menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan syariah pada penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kerangka teori yang mendukung penelitian tersebut.

3. BAB III: Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan uji *Chi-square*, lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta, populasi penelitian ini adalah para penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, pengumpulan data melalui kuesioner.

4. BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif dan uji *Chi-square*, dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya tingkat literasi keuangan syariah pelaku penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. BAB V: Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi untuk perbaikan yang bersangkutan.